

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI SUB BIDANG PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN,
DAN PARIWISATA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BOGOR
SARAH SABILLA**

1701617167



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020**

LEMBAR EKSEKUTIF

Sarah Sabilla. 1701617167. Laporan Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Program Studi Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, April 2020. *Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Segar III Kav 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor, Cibinong. PKL berlangsung selama 20 hari atau dimulai pada tanggal 03 Februari 2020 hingga 28 Februari 2020. Kegiatan yang dimulai pukul 07.20 WIB hingga 16.00 WIB bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa mengenai kondisi dan situasi dalam dunia kerja. Selain itu, agar dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada masa perkuliahan.*

Praktikan ditempatkan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) yang tepatnya pada Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata (PMKP). Selama praktik kerja berlangsung, praktikan ikut serta dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi dari Bappedalitbang dan Sub Bidang PMKP. Berbagai kegiatan yang dikerjakan praktikan, yaitu mengikuti dan menjadi notulen pada setiap rapat terkait kebudayaan dan pariwisata; mengikuti acara Musrenbang Geopark Nasional Pongkor; serta pemetaan program terhadap usulan musrenbang dalam rangka persiapan forum perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Kegiatan kerja berjalan dengan baik dan mematuhi aturan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi pada saat praktikan menjalankan program kerja tersebut dapat diatasi dengan berkomunikasi pada pihak yang bersangkutan.

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Di Sub Bidang
Penanaman Modal, Kebudayaan, Dan Pariwisata Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten
Bogor

Nama Praktikan : Sarah Sabilla

Nomor Registrasi : 1701617167

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,
Koor. Program Studi,



Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M. SE
NIP. 196208091990032001

Pembimbing,



Dr. Saparuddin Mukhtar, M. Si
NIP. 197701152005011001

LEMBAR PENGESAHAN




Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Sri Indah Nikensari, SE, M.SE

NIP. 196208091990032001

Nama,	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. Sri Indah N, S.E.,M.Si</u> NIP. 196208091990032001	 _____	<u>13 Mei 2020</u> _____
Penguji Ahli		
<u>Herlith, S.Sos.,M.Ec.Dev</u> NIP. 198401062014042002	 _____	<u>13 Mei 2020</u> _____
<u>Dr. Saparuddin, M.Si</u> NIP. 197701152005011001	 _____	<u>13 Mei 2020</u> _____

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah – Nya. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan yang berjudul **“Laporan Praktik Kerja Lapangan Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor”**.

Penulisan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa guna melaporkan kegiatan yang dilakukan selama masa praktik kerja berlangsung. Dalam hal ini, penulis mengetahui bahwa untuk menyusun penulisan ini tidak dapat berjalan dengan sendiri, melainkan membutuhkan beberapa pihak guna mendukung penyusunan dari laporan ini. Maka dari itu, penulisan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
2. Dr. Sri Indah Nikensari, S.E., M.SE. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
3. Dr. Saparuddin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan
4. Danni Rahmat, S.T., MM. selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Rahmi Karmellia, S.Hut., M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata
6. Seluruh karyawan Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang telah membantu penulis dalam memenuhi dan melaksanakan PKL
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik

8. Rekan-rekan Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2017 yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun laporan PKL ini, sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk selanjutnya dapat memperbaiki setiap penulisan.

Bogor, 03 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	4
C. Kegunaan PKL.....	4
D. Tempat PKL.....	5
E. Jadwal dan Waktu PKL.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	10
A. Sejarah Instansi	10
B. Struktur Organisasi	11
C. Kegiatan Umum Instansi.....	32
BAB III PELAKSANAAN PKL	34
A. Bidang Kerja	34
B. Pelaksanaan Kerja.....	35
C. Kendala yang Dihadapi.....	45
D. Cara Mengatasi Kendala	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I - 1. Tahap Kegiatan PKL	8
---------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar I - 1. Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor.....	11
Gambar III- 1. Program Strategis Panca Karsa.....	35
Gambar III- 2. Siklus Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah.....	36
Gambar III- 3. Rapat Evaluasi Penyusunan Calendar Event Tahun 2020	37
Gambar III- 4. Rapat Festival Wisata Desa	38
Gambar III- 5. Jadwal Pelaksana Lomba Wisata Desa	39
Gambar III- 6. Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Tahun 2020.....	40
Gambar III - 7. Data Korban Bencana Awal Tahun 2020	41
Gambar III- 8. Rapat Pembahasan lanjutan Usulan Pasca Musrenbang Geopark Pongkor	42
Gambar III- 9. Format Usulan Peserta Musrenbang Geopark Pongkor.....	43
Gambar III-10. Format 3 Usulan Prioritas Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Atas Persetujuan Pihak Kecamatan.....	44
Gambar III- 4. Alur Kerja Pemetaan Program	44
Gambar III- 5. Permendagri No. 90 Tahun 2019	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Harian PKL	54
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin PKL Kelompok Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	57
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Izin PKL Kelompok di Bappedalitbang Kabupaten Bogor.....	58
Lampiran 4. Lembar Absensi PKL	59
Lampiran 5. Lembar Penilaian PKL	61
Lampiran 6. Surat Keterangan PKL di Bappedalitbang Kabupaten Bogor	62
Lampiran 7. Lembar Konsultasi/Bimbingan.....	63
Lampiran 8. Panduan Murenbang Geopark Nasional Pongkor	64
Lampiran 9. Format Usulan Musrenbang	65
Lampiran 10. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Terkait Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Geopark Nasional Pongkor.....	66
Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan atau mental dengan diharapkan dapat menciptakan *Good Governance* yang diinginkan oleh segenap masyarakat. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubah cara berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Shwab (2016) menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu : 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Era tersebut akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Maka dari itu dalam mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0 kebutuhan SDM yang berkualitas tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Semua organisasi baik pemerintah maupun swasta diharapkan mampu menyediakan SDM yang berkualitas, yang mampu menjawab

semua tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan pelatihan SDM. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Seperti yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dalam membangun SDM yang unggul. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah masyarakat. Bermodal sumber daya yang dimiliki berupa ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya, perguruan tinggi dapat menginisiasi perubahan untuk lingkungan sekitarnya.

Menurut Pinheiro, Benneworth, *et al* (2015), Perguruan tinggi dipandang sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan peluang yang ada seperti, Universitas Negeri Jakarta (UNJ). UNJ merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan daya saing. Peran ini sejalan dengan fungsi pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 4 dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan guna menciptakan SDM yang berkualitas ialah melalui program Pratik Kerja Lapangan yang wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Pengembangan diri dalam situasi dan kondisi dunia kerja merupakan salah satu tujuan dari adanya praktik kerja lapangan ini.

Sejalan dengan era revolusi 4.0 yang akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, praktikan memilih instansi pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Bogor. Jika dilihat dari perbandingan luas wilayah antar kabupaten di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor merupakan wilayah ketiga dengan luas terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (2016), luas wilayah tertinggi diperoleh dari Kabupaten Sukabumi (4.145 km²), dilanjut dengan Kabupaten Cianjur (3.840 km²), dan selanjutnya Kabupaten Bogor (2.710 km²). Dengan luasnya wilayah tersebut seharusnya dapat mensejahterahkan masyarakat dengan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Untuk memaksimalkan SDA, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ikut serta dalam memaksimalkannya. Berdasarkan data BPS (2019), jumlah penduduk Kabupaten Bogor merupakan jumlah penduduk terbesar di kabupaten se-jawa barat yaitu sebesar 5.965.410 jiwa. Melihat luas wilayah disertai dengan jumlah penduduk terbesar, maka praktikan memiliki keterkaitan dengan program studi yang ditempuh penulis, terkhusus keterkaitan dengan mata kuliah yang telah diampuh. Diperlukan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui

pembangunan wisata di daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu :

1. Menyalurkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam dunia kerja
2. Mempraktikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada dunia kerja
4. Mempelajari proses perencanaan suatu daerah yang dilakukan oleh lembaga teknis daerah

Selain itu, tujuan dari pelaksanaan PKL adalah :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan serta potensi mahasiswa melalui praktik kerja lapangan
2. Mengembangkan relasi dalam dunia kerja
3. Menjalankan kewajiban mahasiswa dalam menuntaskan mata kuliah yang tengah ditempuh, yaitu PKL.
4. Meningkatkan kualitas diri dalam dunia kerja

C. Kegunaan PKL

Pelaksanaan program PKL memiliki kegunaan yang dapat peroleh oleh beberapa pihak terkait, yaitu :

1. Bagi Praktikan

- a. Melatih kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab sebagai budaya dalam dunia kerja
 - b. Melatih dan menambah keterampilan diri mahasiswa
 - c. Mengembangkan relasi dalam dunia kerja
 - d. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia kerja
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 - a. Memperkenalkan kualitas mahasiswa dari program studi Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Ekonomi kepada pihak yang bersangkutan
 - b. Menjalin hubungan kerja sama antara akademisi dengan instansi yang bersangkutan
 3. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor
 - a. Menjalin hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Bappedalitbang Kabupaten Bogor
 - b. Menjalin hubungan kerja sama antara mahasiswa dengan Bappedalitbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

D. Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di salah satu lembaga teknis pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Berikut informasi mengenai lembaga teknis tersebut :

Nama Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor
Alamat : Jalan Segar III Kav 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor,

Cibinong – Bogor, Jawa Barat

Divisi : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA),
tepatnya pada sub bidang Penanaman Modal, Kebudayaan,
dan Pariwisata

Website : bappedalitbang.bogorkab.go.id

Program PKL yang dilaksanakan di tempat tersebut telah dipilih atas pertimbangan beberapa pihak, seperti pertimbangan kelompok PKL hingga kepala program studi. Selain itu, pertimbangan mengenai pemilihan tempat tersebut meliputi :

1. Lokasi strategis yang berada di kompleks perkantoran pemerintah daerah
2. Jarak antara kediaman dengan lokasi PKL dapat ditempuh dengan waktu singkat
3. Bidang kerja yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi instansi tersebut sesuai dengan teori dan materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan, seperti ekonomi regional; serta ekonomi sumber daya manusia dan sumber daya alam.
4. Tertarik dalam hal perencanaan pembangunan suatu daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat.

E. Jadwal dan Waktu PKL

Praktikan melaksanakan program PKL selama dua puluh hari kerja, yang terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020, dengan ketentuan kerja sebagai berikut:

Hari kerja : Senin - Jumat

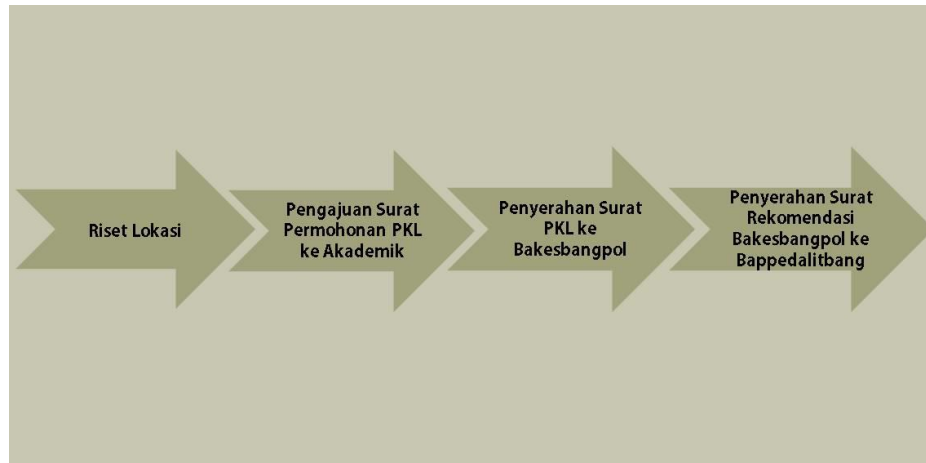
Jam masuk : 07.20 WIB

Waktu Istirahat : 12.00- 13.00 WIB

Jam pulang : 16.00 WIB

Kegiatan PKL dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; dan tahap penulisan laporan. Ketiga tahap tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan



Gambar I - 1. Tahap Persiapan PKL

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Praktikan melakukan persiapan PKL dimulai dengan mencari informasi mengenai instansi pemerintah yang bersedia menerima mahasiswa untuk menjalankan program magang. Riset yang dilakukan pada bulan Desember 2019, diawali dengan survei lokasi guna mengetahui persyaratan yang harus disiapkan sebelum menjalankan program tersebut. Salah satu persyaratan yang harus disiapkan adalah menyerahkan surat permohonan PKL yang ditujukan untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor. Seluruh pengajuan kegiatan yang dilakukan di pemerintah daerah harus melalui badan tersebut sebagai salah satu syarat perizinan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus disiapkan, praktikan mengajukan surat permohonan PKL kepada Kepala Program Studi yang kemudian diteruskan ke bagian akademik Fakultas Ekonomi, lalu dilanjutkan prosesnya ke bagian fakultas di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Surat permohonan yang telah selesai dibuat, kemudian diajukan kepada Bakesbangkol untuk meminta persetujuan

atau rekomendasi izin pelaksanaan PKL di Bappedalitbang. Setelah mendapatkan surat rekomendasi izin dari Bakesbangpol, maka praktikan mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bappedalitbang. Praktikan mendapatkan konfirmasi untuk hadir dan diberikan arahan mengenai penempatan bidang pada Januari 2020 lalu. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, maka praktikan ditempatkan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL telah dilakukan sesuai dengan pedoman akademik yaitu selama 20 hari kerja. Praktikan melaksanakan PKL terhitung mulai dari tanggal 03 Februari hingga 28 Februari 2020. Praktik kerja tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pedoman akademik dan peraturan Bappedalitbang itu sendiri. Berakhirnya praktik kerja tersebut diakhiri dengan pemberian surat keterangan telah melaksanakan praktik kerja lapangan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor.

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Praktikan bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan kegiatan selama praktik kerja berlangsung. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini sesuai dengan bidang kerja, dan diperoleh selama menjalankan kegiatan PKL. Penyusunan laporan dimulai dari Maret 2020 sampai dengan April 2020. Selama penulisan berlangsung, praktikan telah melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing guna memperbaiki laporan PKL.

Berdasarkan tiga tahap yang telah diuraikan diatas, berikut ringkasan berupa *timeline* dari ketiga tahap tersebut, yaitu :

Tabel I - 1. Tahap Kegiatan PKL

Bulan/ Tahapan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Persiapan							
Pelaksanaan							
Penulisan							

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Lembaga teknis ini berada dibawah arahan dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan badan perencanaan daerah dilalui dari berbagai peraturan keputusan. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1964 tentang Badan Koordinasi Pembangunan Daerah, diketahui bahwa pada saat itu badan perencanaan daerah bernama BAKOPDA (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah). Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

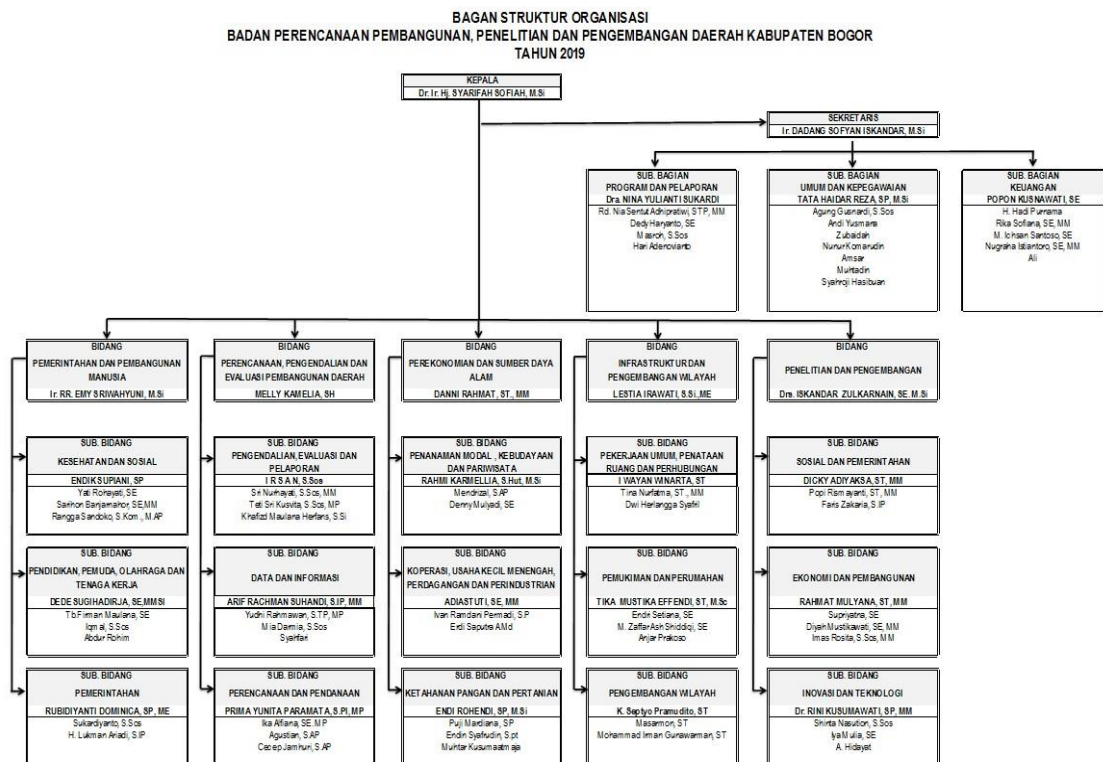
Perubahan nama pada lembaga ini disertai dengan perubahan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 36, menjelaskan bahwa Dinas Pemerintah Daerah lingkup Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga tipe, yaitu Tipe-A, Tipe-B, dan Tipe-C. Bappeda Kabupaten Bogor berada di Tipe-A sesuai dengan beban kerjanya yang besar. Tipe ini juga menentukan batas maksimal bidang yang tercantum oleh masing-masing Dinas. Dikarenakan Bappeda Kabupaten Bogor berada pada Tipe-A, maka Bappeda berhak memiliki empat bidang, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM); Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RENDALEV); Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Ala (PSDA); dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW).

Di PP yang sama, namun pada pasal yang berbeda yaitu pasal 40 menjelaskan bahwa dibolehkannya penggabungan dua dinas yang memiliki kriteria adanya kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Bogor bergabung dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Karena adanya

penggabungan dua dinas tersebut, maka Bappeda berubah menjadi Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Bogor. Atas perubahan tersebut, saat ini terdapat lima bidang yang tertera dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yakni, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM); Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RENDALEV); Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA); Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW); dan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

B. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Bogor sesuai dengan Permendagri Nomor 05 tahun 2016 :



Gambar I - 2. Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Sumber : bappedalitbang.bogorkab.go.id/struktur-organisasi/

SOTK Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa bagian dan bidang yang masing-masing membawahi sub bagian maupun sub bidang dirincikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata
 - b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Berikut tugas pokok dan fungsi dari setiap unsur organisasi yang tercantum dalam struktur organisasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
- Penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- Penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- Pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;
- Pengelolaan situs web Badan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- Pengelolaan barang/jasa Badan;
- Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Penatausahaan keuangan Badan;
- Penyusunan pelaporan keuangan Badan;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
- Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- Penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;

- Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang data dan informasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan

hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;

- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;

- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang
- Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Ekonomi dan Pembangunan;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup sub bidang inovasi dan teknologi;
- Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- Penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

- Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup sub bidang inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang inovasi dan teknologi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. Kegiatan Umum Instansi

Bappedalitbang Kabupaten Bogor memiliki rumusan Visi dan Misi, yaitu :

- **VISI :**

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia”

- **MISI :**

“Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana”

“Meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan”

“Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan”

Bappedalitbang selaku lembaga teknis memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas pokok Bappedalitbang ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

PELAKSANAAN PKL

A. Bidang Kerja

Dari berbagai bidang yang tercantum dalam struktur organisasi, praktikan ditempatkan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA). Penempatan pada bidang PSDA ditujukan karena sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh praktikan. Bidang tersebut membawahi tiga sub bidang, yaitu sub bidang penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata; sub bidang koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian; serta sub bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dari ketiga sub bidang tersebut, praktikan ditempatkan pada sub bidang penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata (PMKP) sebagai fokus utama bidang kerja yang akan dilakukan selama kegiatan PKL berlangsung.

Penempatan praktikan pada sub bidang ini dibimbing oleh kepala sub bidang PMKP yaitu Rahmi Karmeilia, S.Hut, M.Si. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama masa kerja berlangsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subid ini. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Menghadiri dan menjadi notulen pada setiap rapat yang berkaitan dengan penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata. Seperti rapat *calendar event*, dan rapat festival wisata desa.
2. Menghadiri Musrenbang Geopark Nasional Pongkor yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang.
3. Mempersiapkan RKPD dalam rangka Forum Perangkat Daerah. Persiapan RKPD dimulai pasca Musrenbang Geopark Pongkor yaitu dengan memprioritaskan usulan yang diajukan melalui rapat bersama perwakilan kecamatan di kawasan Geopark Pongkor, kemudian dilanjut dengan pemetaan program usulan prioritas berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah.

B. Pelaksanaan Kerja

Sebagai lembaga teknis yang membantu bupati dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, maka arah kerja harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan oleh bupati dan wakilnya pada masa jabatan yang berlaku. RPJMD merupakan penjabaran Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor.

Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, memiliki visi dan misi untuk membangun daerah. Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Bupati telah mengeluarkan arah kebijakan melalui kegiatan atau program strategis yang disebut dengan Panca Karsa.



Gambar III- 6. Program Strategis Panca Karsa

Sumber : Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata

Panca Karsa yang berarti lima tekad atau lima kekuatan untuk membangun Kabupaten Bogor. Lima karsa tersebut memiliki makna masing-masing guna membangun daerah. Karsa yang menjadi kewenangan urusan PMKP adalah Karsa Bogor Maju dan Bogor Berkeadaban yang dirincika sebagai berikut :

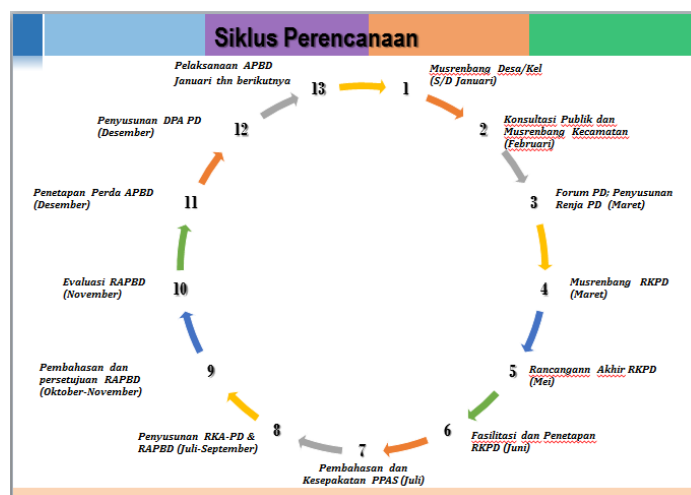
1. Bogor Maju :

- Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional
- Festival Desa Wisata
- Pengembangan Geopark

2. Bogor Berkeadaban :

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Pengembangan dan pelestarian budaya cimande
- Pelestarian budaya melalui program *Bogor Culture Night*

Perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilakukan melalui siklus perencanaan, dimana siklus tersebut mencakup perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan. Siklus tersebut dimulai dengan adanya musrenbang desa yang dilaksanakan pada bulan Januari. Dimana musrenbang desa tersebut bertujuan untuk memperoleh usulan-usulan dari masyarakat, forum, maupun pemerintah desa mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pembangunan desa. Setelah memperoleh usulan dari musrenbang desa, diteruskan ke musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, hingga alur lainnya yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



Gambar III- 7. Siklus Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Sumber : jepara.go.id

Praktikan menjalankan praktik kerja bertepatan pada tahap dua yaitu tahap musrenbang kecamatan. Dimana tahap kedua ini juga diadakan musrenbang khusus, yaitu Musrenbang Geopark Nasional Pongkor yang mencakup 15 kecamatan di Kabupaten Bogor. Rangkaian kegiatan yang dilakukan praktikan selama masa praktik kerja, yaitu :

1. Menghadiri dan Menjadi Notulen Pada Setiap Rapat yang Berkaitan dengan Penanaman Modal, Kebudayaan, Dan Pariwisata.

a. Rapat Evaluasi Penyusunan *Calendar Event* Tahun 2020



Gambar III- 8. Rapat Evaluasi Penyusunan *Calendar Event* Tahun 2020

Sumber : bappedalitbang.bogorkab.go.id

Pada rapat kali ini, praktikan ditugaskan untuk menjadi notulen. Dimana maksud dan tujuan atas perintah kepala pembimbing adalah agar praktikan mengetahui pembahasan yang dipaparkan dalam rapat tersebut. Semua paparan yang diberikan oleh para narasumber rapat tersebut dicatat dalam format yang telah disediakan, kemudian notulensi tersebut diserahkan kepada karyawan guna menjadi pertanggungjawaban atas terselenggaranya rapat tersebut. Hal terpenting dalam penugasan ini ialah diharuskan untuk teliti dan mendengar secara hati-hati materi yang disampaikan.

Rapat evaluasi penyusunan *calendar event* yang dilaksanakan pada 7 Februari 2020 di Ruang Rapat Bupati dihadiri oleh Kepala Bidang PSDA

Bappedalitbang, Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Kabupaten Bogor, FORMI Kabupaten Bogor, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Bogor, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah, serta perwakilan kecamatan. Kesimpulan yang diambil dari rapat ini adalah *event* tahunan pada Hari Jadi Bogor akan terselenggara beberapa kegiatan seperti

- Bogor Cullinary Week
- Festival anklung
- Alimpaido
- Bogor blogger gathering
- Bogor night fashion festival
- Stand up comedy/ Bogor ngabodor
- Bogor auto fest
- Property fest Travel fest, job fair, book fair
- Nikah massal

b. Rapat Festival Wisata Desa.



Gambar III- 4. Rapat Festival Wisata Desa

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Praktikan menghadiri dan menjadi notulensi pada rapat festival wisata desa yang dilaksanakan pada 12 Februari 2020 di Ruang Rapat Cibeet Bappedalitbang dihadiri oleh Kepala Bidang PSDA, Subbid PMKP,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komite Perencana, dan Akademisi. Praktikan menjadi notulen pada rapat dengan pembahasan festival wisata desa yang didalamnya mencakup lomba wisata desa. Lomba tersebut bertujuan agar desa menemukan potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, serta sekaligus melestarikan lingkungan dan adat budaya setempat.

Lomba yang mengusung tema “Membangun Bangsa Dari Desa”, memiliki kriteria untuk kelompok yang ingin mengikuti ajang persaingan antar desa ini. Kriteria tersebut terbagi menjadi tiga daya tarik, yaitu wisata alam; wisata budaya; dan wisata buatan. Berikut Jadwal pelaksanaan lomba wisata desa hingga festival wisata desa tahun 2020 :

KEGIATAN	LOKASI	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Wisata Desa										
a. Lomba Wisata Desa	Kab. Bogor									
• Penyebaran Informasi	Kab. Bogor			FD	FD					
• Sosialisasi Jukdis/Jobdis	Kab. Bogor				7					
• Penertaman Dokumen	Kab. Bogor				13	s.d	5			
• Seleksi 10 besar	Kab. Bogor						8 – 10			
• Orientasi Lapangan	Jawa Timur						22 – 26			
• Penjurian (Visit Lapangan)	Kab. Bogor							6 – 21		
• Penjurian (Penetapan 3 besar)	Kab. Bogor							22 – 24		
• Pengumuman	Kab. Bogor								29	
c. Festival Wisata Desa	Kab. Bogor								28 – 29	

Gambar III- 5. Jadwal Pelaksana Lomba Wisata Desa

Sumber : Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata

Masyarakat desa yang dapat ikut serta dalam perlombaan ini adalah kelompok, bukan perorangan. Kelompok tersebut merupakan penanggung jawab sebagai pengelola wisata tersebut, seperti karang taruna. Desa yang ingin ikut serta dalam perlombaan ini tidak dibatasi jumlahnya, dengan

catatan bahwa pendaftaran tidak mengatasnamakan pribadi. Tiga besar pemenang dari perlombaan ini akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000.000.000 (Juara 1), Rp600.000.000 (Juara 2), dan Rp400.000.000 (Juara 3). Hadiah tersebut diberikan sebagai pendanaan dalam mengelola wisata tersebut dengan syarat bahwa pemenang harus menyerahkan *Business Plan*. Setiap wisata harus bekerja sama dengan BUMDes.

2. Menghadiri Rangkaian Acara Musrenbang Geopark Nasional Pongkor



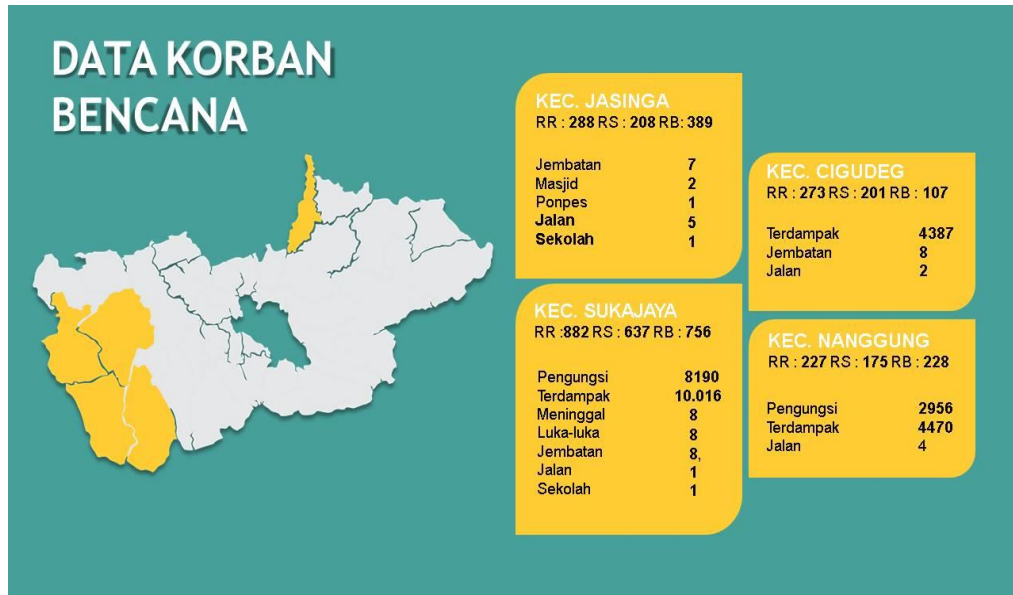
Gambar III- 6. Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Tahun 2020

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Masa kerja praktikan berada di tahap dua siklus perencanaan, yaitu tahap musrenbang kecamatan. Selain itu, di tahap ini pun terdapat penyelenggaraan musrenbang khusus, yaitu musrenbang kecamatan Geopark Nasional Pongkor. Praktikan ditugaskan untuk mengikuti rangkaian acara musrenbang Geopark Nasional Pongkor yang diselenggarakan pada 18 Februari 2020 di The Highland Park and Resort Hotel. Maksud dan tujuan praktikan diikutsertakan dalam acara ini adalah agar praktikan mengetahui proses musrenbang, dan menjadi pondasi awal untuk melakukan tugas lainnya. Musrenbang khusus ini membahas mengenai pemulihan kawasan Geopark Nasional Pongkor pasca bencana awal

tahun 2020. Geopark Pongkor yang berpusat di Kecamatan Nanggung mulai disosialisasikan konsepnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada Musrenbang tahun 2018, sebagai konsep ekonomi kecil kerakyatan mandiri. November 2018, Geopark Pongkor telah menjadi Geopark Nasional yang mencakup 15 kecamatan dengan luas kawasan sebesar 130.157,47 HA. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Rumpin, Ciseeng, dan Parung.

Awal tahun 2020, wilayah Kabupaten Bogor yang termasuk dalam kawasan Geopark Pongkor mengalami kerusakan yang parah di beberapa kecamatan akibat terjadinya bencana banjir, angin kencang dan puting beliung, serta bencana longsor. Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Jasinga, dan Cigudeg yang termasuk dalam kawasan Geopark Pongkor merupakan wilayah terparah dampak bencana dengan rincian data kerusakan sebagai berikut :



Gambar III - 7. Data Korban Bencana Awal Tahun 2020

Sumber : Data Diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Musrenbang khusus ini memprioritaskan pada tiga hal, yaitu usulan yang mendukung pemulihan pasca bencana, usulan yang mendukung kriteria

penilaian menuju UGG (Unesco Global Geopark) tahun 2022, dan Peningkatan SDM dan Ketahanan Sosial. Selain itu, rangkaian acara yang dilaksanakan di kecamatan Taman Sari ini melangsungkan HUT ke-1 Geopark Pongkor. Dalam rangka memeriahkan HUT Geopark Pongkor, panitia mengadakan beberapa perlombaan. Perlombaan tersebut meliputi lomba karya tulis, lomba fotografi, lomba vlog, lomba poster, dan lomba mewarnai untuk siswa-siswi di kawasan Geopark Pongkor. Pemenang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pengumpulan berkas, berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.

3. Mempersiapkan RKPD dalam rangka Forum Perangkat Daerah.

Persiapan RKPD dimulai pasca Musrenbang Geopark Pongkor yaitu dengan memprioritaskan usulan yang diajukan melalui rapat bersama perwakilan kecamatan di kawasan Geopark Pongkor, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan program usulan prioritas berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah.

a. Rapat pembahasan lanjutan mengenai usulan prioritas Musrenbang Geopark Pongkor



Gambar III- 8. Rapat Pembahasan lanjutan Usulan Pasca Musrenbang Geopark Pongkor

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Rapat yang dilaksanakan pada 20 februari 2020 dengan dihadiri oleh para perwakilan kecamatan di kawasan Geopark Pongkor membahas mengenai usulan-usulan dari masyarakat dan forum pada Musrenbang Geopark Pongkor lalu. Usulan tersebut dibahas mulai dari volume, satuan, lokasi, dan anggaran yang diperkuat dengan alasan dan perangkat tujuan. Setiap desa diberikan anggaran atau pagu indikatif sebesar Rp1.000.000.000 dengan berbagai usulan kegiatan yang mendukung pemulihan pascabencana.

Pada rapat ini, praktikan membuat notulensi dan membuat draft usulan-usulan yang telah sesuai dengan kesepakatan antara pihak kecamatan dengan bappedalitbang (subbid PMKP) dan sesuai dengan pagu indikatif. Berikut salah satu format usulan masyarakat dan usulan yang telah disepakati dan disesuaikan dengan anggarannya :

**DAFTAR USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG GEOPARK
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021**

PENGUSUL KECAMATAN								
NO	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		ANGGARAN (Rp)	ALASAN	
				KECAMATAN	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bantuan Jalar untuk Bencana (tipe kempi)	1	Paket	Sukajaya	Kiamani	200.000.000		
2	Pengiriman alat Tanggap darurat bencana	1	Paket	Sukajaya	Kiamani	450.000.000		
3	Pelatihan tanggap darurat Bencana	1	Paket	Sukajaya	Kiamani	150.000.000		
4	Gedung Desa/ CAMP	1	Paket	Sukajaya	Kiamani	200.000.000		

Cibinong, Februari 2020

Pengusul
[Signature]
[Signature]

Petunjuk pengisian :
 Kolom (1) Ditisi dengan nomor urut kegiatan yang diusulkan
 Kolom (2) Ditisi dengan kegiatan yang diusulkan dan telah disepakati oleh forum (dewan dan pratama, serta pembudayaan masyarakat)
 Kolom (3) Ditisi dengan satuan mendukung pemulihan pasca bencana, infrastruktur dan lingkungan hidup (dalam pratama umum dan sarana pratama wisata serta kawasan lindung)
 Kolom (4) Ditisi dengan kegiatan yang diusulkan USG : **penataan kawasan/pertanian** (sumber bumi : (sumber pertanian) (sumber/teknologi nilai warisan bumi (geologi, arkeologi, etnologi, sejarah dan budaya) **Pengembangan Geowisata**
Kategori Masyarakat (Pembudayaan USRM dan kebudayaan ekonomi lainnya) **penataan kombrasi/peningkatan penelitian dan pengembangan**
 2
 Petunjuk usulan mendukung ketahanan sosial, peningkatan SDM (Datar Bawah), **kegiatan R** kearifan lokal (SDM melalui pariwisata dan USRM), **penyediaan sarana kesehatan rumah susuteraan serta keamanan dan ketertarikan**
 Kolom (5) Ditisi dengan volume, satuan dan pagu indikatif anggaran yang diusulkan sesuai dengan perkiraan yang direvisi
 Kolom (6) Ditisi dengan nama Desa, Detail : Calon Pemukiman, alamat lengkap, BUK. RT, RW dan informasi detail lainnya yang memuat lokasi untuk penunjukan
 Kolom (7) Menjabarkan alasan kenapa harus diwujudkan

Gambar III- 9. Format Usulan Peserta Musrenbang Geopark Pongkor

Sumber : Diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Format 3 Kecamatan Jasinga - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

NO	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI			ANGGARAN	ALASAN	PERANGKAT DAERAH TULUHAN
				KECAMATAN	DESA	DETAIL			
1	Pembuatan Gapura Selamat Datang di Geopark Pongkor Kecamatan Jasinga	1	unit	Jasinga	Kalongsawah	desa Kalongsawah- kec o.gudeg	Rp. 300.000.000	Promosi wisata geopark Pongkor	D/Repp
2	Pengembangan daya tarik wisata Situ Kadondong	1	paket	Jasinga	Kolcaang	Kp. Panukulan Rt. 3/7	Rp. 70.000.000	Penjelasan tentang situ Geopark	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan daya tarik wisata Situ Jantegem	1	paket	Jasinga	Barenglok	Kp. Situgiran Rt. 4/2	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
4	Pengembangan daya tarik wisata Situ Dipayang	1	paket	Jasinga	Oikopomayak	Kp. Rancabuntung Rt. 4/1	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
5	Pengembangan daya tarik wisata Situ Cipanevan	1	paket	Jasinga	Neglasari	Desa Neglasari Rt. 3/1	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
6	Pengembangan daya tarik wisata Situ Pangempaan	1	paket	Jasinga	Pangaur	Kp. Pamaiang Rt. 5/2	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
7	Pengembangan daya tarik wisata Situ Jengret	1	paket	Jasinga	Oikopomayak	Kp. Pasimangris Rt.5/2	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
8	Pengembangan daya tarik wisata Curug Cipanas	1	paket	Jasinga	Jugalsajaya	Kp. Kembangluning Rt.7/5	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
9	Pengembangan daya tarik wisata Curug Bandung	1	paket	Jasinga	Pangradin	Kp. Pangradin II Rt.4/4	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
10	Pengembangan daya tarik wisata Curug Cibanteng dan cadas ngampar	1	paket	Jasinga	Kalongsawah	Kp. Panungsapi Rt. 4/8	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
11	Pengembangan daya tarik wisata Goa Kupak	1	paket	Jasinga	Wirajaya	Kp. Cibenteng Rt. 2/8	Rp. 70.000.000	Pengembangan Wisata Geopark	Dinas Pariwisata
							Rp. 1.000.000.000		

Gambar III- 10. Format 3 Usulan Prioritas Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Atas Persetujuan Pihak Kecamatan

Sumber : Diolah oleh Penulis

b. Pemetaan Program Usulan Prioritas Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019



Gambar III- 9. Alur Kerja Pemetaan Program

Sumber : Diolah oleh Penulis

Setelah usulan prioritas Musrenbang Geopark Pongkor diterima, praktikan melakukan pemetaan program pada usulan tersebut yang

disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pemetaan program dilakukan dalam rangka persiapan untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, dimana pemetaan program tersebut akan menjadi rencana kerja (renja) setiap perangkat daerah. Permendagri No. 90 telah menetapkan kode yang mencakup kode urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Praktikan memetakan nomenklatur mana yang sesuai dengan usulan yang diajukan, selain itu praktikan mengelompokkan urusan bidang perangkat daerah mana yang menaungi program tersebut. Berikut salah satu contoh nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 :

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Activ
Go to

Gambar III- 10. Permendagri No. 90 Tahun 2019

Sumber : Permendagri No. 90 Tahun 2019

C. Kendala yang Dihadapi

Selama program praktik kerja lapangan berlangsung, praktikan mengalami beberapa kendala, seperti :

1. Praktikan Tidak Ikut Serta Dalam Musrenbang Kecamatan

Masa kerja praktikan berada di tahap dua siklus perencanaan, yaitu tahap musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 03 hingga 13 Februari 2020, dengan membentuk tim untuk hadir dalam musrenbang tersebut. Dalam satu hari terbagi menjadi lima tim yang terdiri atas gabungan seluruh bidang di Bappedalitbang. Praktikan tidak mengikuti rangkaian kegiatan musrenbang kecamatan, karena praktikan diberi penugasan untuk mempersiapkan data-data guna penyelenggaraan Musrenbang Khusus Geopark Nasional Pongkor.

2. Kurangnya koordinasi Antar Dinas-dinas terkait dan Bappedalitbang dalam Penyesuain Klasifikasi Program Kegiatan Urusan Bidang Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Pemetaan program untuk RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) kini sudah diatur oleh Permendagri No.90 Tahun 2019, namun dengan peraturan baru tersebut ditemukan kendala atau hambatan yang terjadi antar perangkat daerah. Dalam permendagri tersebut telah ditentukan secara paten mengenai program dan urusan bidang perangkat daerah dalam pelaksanaan RKPD. Maka dari itu, dapat disebutkan bahwa kurang adanya koordinasi bappedalitbang dengan dinas-dinas terkait dalam klasifikasi program kegiatan dan urusan bidang. Contohnya, terdapat usulan mengenai pembuatan gapura di wilayah yang termasuk dalam kawasan Geopark Pongkor, maka usulan tersebut masuk kedalam urusan bidang pariwisata yang ditujukan untuk perangkat daerah dinas kebudayaan dan pariwisata, bukan termasuk urusan bidang infrastruktur.

D. Cara Mengatasi Kendala

Dari beberapa kendala yang dihadapi praktikan selama berlangsungnya praktik kerja, mahasiswa dapat mengatasi kendala tersebut dengan cara :

1. Berinisiatif Meminta Notulensi Musrenbang Kecamatan

Dikarenakan tidak mengikuti musrenbang kecamatan, maka praktikan mengambil keputusan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan berinisiatif

untuk mencari informasi dan meminta notulensi mengenai proses berlangsungnya acara tersebut. Setelah mendapatkan notulensi, praktikan berdiskusi guna menambah pengetahuan dalam perumusan RKPD. Tindakan inisiatif tersebut dapat disebut dengan tindakan inisiatif pribadi, inisiatif pribadi diartikan sebagai sindrom perilaku yang menghasilkan individu aktif untuk mencapai tujuan kerja dan bertahan dalam segala kesulitan (Frese, Kring, *et al* 1996). Individu yang aktif mendorong perbuatan atau perilaku seseorang untuk tidak menunggu pekerjaan. Selain itu, inisiatif pribadi menjadi penting di masa depan karena perusahaan akan membutuhkan seseorang dengan tingkat kemandirian yang tinggi (Frese, 1997). Bagi perusahaan, inisiatif pribadi akan memberikan keuntungan karena mampu meningkatkan efektivitas perusahaan dan individu masing-masing karyawan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan inisiatif yang dilakukan oleh praktikan mampu mengatasi kesulitan yang dialami dalam mencapai tujuan kerja.

2. Koordinasi Antara Dinas Terkait Dengan Bappedalitbang Mengenai Klasifikasi Program Kegiatan Urusan Bidang Berdasarkan Pemendagri No. 90 Tahun 2019

Dikarenakan adanya peraturan baru, maka perangkat daerah yang terlibat dalam proses perencanaan daerah tersebut harus melakukan koordinasi guna tidak adanya saling lempar program kegiatan pada masing-masing urusan bidang. Menurut G.R. Terry dalam Malayu Hasibuan (2014), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi tersebut didukung oleh (Siagian, 1978), menjelaskan bahwa koordinasi adalah pengaturan keterkaitan pada usaha bersama dalam rangka mencapai keseragaman tindakan untuk meraih tujuan bersama.

Koordinasi dalam hal ini termasuk dalam koordinasi eksternal yang bersifat horizontal atau fungsional. Koordinasi horizontal terjadi pada pihak yang

memiliki kedudukan setingkat dan disertai dengan fungsi dan tanggung jawab yang sama atau saling berkaitan. Bea FX, Haas, et al dalam Ramūnas Vanagas (2014), mengidentifikasi penyebab yang memunculkan kebutuhan akan koordinasi yaitu, Pembagian kerja dan spesialisasi; perbedaan persepsi yang untuk menemukan solusi yang sesuai; dan Masalah alokasi sumber daya yang terbatas. Koordinasi sangat penting untuk mengarahkan aktivitas semua anggota organisasi menuju tujuan utama organisasi (Bea & Haas, 2005). Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan baru yang mengakibatkan saling lempar program kegiatan urusan bidang dapat diatasi dengan adanya koordinasi antar dinas-dinas dengan Bappedalitbang. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya pertemuan dinas-dinas dengan bappedalitbang, agar setiap dinas memahami klasifikasi program kegiatan urusan bidang berdasarkan Pemendagri No. 90 Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat dibutuhkan, karena harus bersaing dengan IPTEK. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang tepat untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Seperti yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dalam membangun SDM yang unggul. Perguruan tinggi dipandang sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang ada seperti Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan guna menciptakan SDM yang berkualitas ialah melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Pengembangan diri dalam situasi dan kondisi dunia kerja merupakan salah satu tujuan dari adanya praktik kerja lapangan ini.

Program PKL dilaksanakan selama 20 hari masa kerja yang terhitung mulai dari tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020, di sebuah lembaga teknis pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Program tersebut memberikan banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, hingga relasi kerja. Penulis memperoleh pengetahuan tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan berdasarkan siklus perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penulis pun dapat menambah

pengetahuan mengenai proses pemulihan kawasan Geopark Pongkor pasca tertimpa bencana di awal tahun 2020 dengan mengacu pada Pemendagri No. 90 tentang . Meskipun terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami, penulis dapat mengatasinya dengan baik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan pada instansi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan praktik kerja yang telah dilaksanakan, maka terdapat beberapa saran guna menjadikan program PKL yang lebih baik lagi bagi segala pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa perlu melakukan survey tempat PKL lebih mendalam mengenai kegiatan umum atau tugas dan fungsi dari instansi tersebut.
- b. Mahasiswa perlu memastikan lebih lanjut mengenai penyesuaian tempat PKL yang diizinkan oleh pihak akademik.
- c. Mahasiswa perlu berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai tempat PKL yang dituju.

2. Bagi Fakultas

- a. Pihak akademik perlu memberikan arahan kepada mahasiswa sebelum menjalankan program PKL. Hal tersebut dikarenakan agar mahasiswa dapat terarah dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa yang harus dikerjakan pada masa PKL

- b. Pihak akademik perlu menetapkan aturan mengenai tempat PKL yang diperbolehkan, baik itu perusahaan atau instansi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan agar mahasiswa mengurus administrasi dan melaksanakan PKL tepat pada waktunya
3. Bagi Instansi
- a. Pihak instansi perlu menyediakan kartu tanda pengenal atau disebut id card kepada mahasiswa atau siswa yang menjalankan PKL. Hal tersebut dikarenakan agar mempermudah mahasiswa untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dan mempermudah sosialisasi antara karyawan dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Shwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.
- Siagian, S. (1978). *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bea, F., & Haas, J. (2005). *Strategisches Management*. Germany.

JURNAL

- Frese, & Kring. (1996). Personal Initiative (PI) at work: Differences between East and West Germany. *Academy of Management Journal*, 39, 37–63.
- Frese, M. (1997). Dynamic self-reliance: An important concept for work, 399–416.
- Pinheiro, & Benneworth. (2015). Beyond the obvious: Tensions and volitions surrounding the contributions of universities to regional development: A cross-country comparison., 7–9. <https://doi.org/doi:10.1007/s10734-015-9958-7>.
- Ramūnas. (2014). IMPACT OF COORDINATION FOR ORGANIZATION PROCESS. *INTELLECTUAL ECONOMICS*, 8. <https://doi.org/doi:10.13165/IE-14-8-2-08>

INTERNET

- BPS. (2016). Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Retrieved from <https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/03/12/10/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2016.html>
- BPS. (2019). Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2019. Retrieved from <https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2020/02/11/212/-jumlah-penduduk-dan-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2019.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1. Kegiatan Harian PKL

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 03 Februari 2020	Pengenalan atau observasi bidang dan sub bidang yang ada di Bappedalitbang
2	Selasa, 04 Februari 2020	Menganalisis RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
3	Rabu, 05 Februari 2020	Mengikuti rapat kerja sub bidang ketahanan pangan dan pertanian dalam rangka pemetaan program dari UU no.23 tahun 2014 dan Permendagri no.90 tahun 2019 menjadi rencana kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersama DKP (Dinas Ketahanan Pangan) dan Diskanak (Dinas Perikanan dan Peternakan)
4	Kamis, 06 Februari 2020	Menngikuti rapat program dan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD bersama Perangkat Daerah
5	Jum'at 07 Februari 2020	Mengikuti rapat <i>calendar event</i> yang diselenggarakan oleh sub bidang penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata dan dihadiri oleh sekretaris daerah dan dinas-dinas terkait serta 40 perwakilan kecamatan
6	Senin, 10 Februari 2020	Menghadiri pengenalan Bappedalitbang oleh sekretaris badan yang dihadiri oleh siswa dan mahasiswa PKL di seluruh bidang dan sub bidang bappedalitbang
7	Selasa, 11 Februari 2020	Pemahaman RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2018-2023
8	Rabu, 12 Februari 2020	Mengikuti rapat festival wisata desa yang diselenggarakan oleh sub bidang penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata



9	Kamis, 13 Februari 2020	Menganalisis Panca Karsa dalam lingkup penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata
10	Jum'at, 14 Februari 2020	Mengikuti rapat LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) bersama Diskanak (Dinas Perikanan dan Peternakan) dan Distanhorbun (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)
11	Senin, 17 Februari 2020	Mengikuti rapat persiapan Musrenbang Geopark Nasional Pongkor
12	Selasa, 18 Februari 2020	Mengikuti rangkaian acara Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Kabupaten Bogor Tahun 2020 di The Highland Park and Resort Hotel, dalam rangka pemulihan kawasan wisata pasca bencana alam
13	Rabu, 19 Februari 2020	Menyusun usulan Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Kabupaten Bogor Tahun 2020
14	Kamis, 20 Februari 2020	Mengikuti rapat pembahasan mengenai usulan prioritas kecamatan mengenai pemulihan kawasan geopark pasca bencana alam yang dihadiri oleh para perwakilan kecamatan
15	Jum'at, 21 Februari 2020	Merevisi usulan prioritas kecamatan mengenai pemulihan kawasan geopark pasca bencana alam
16	Senin, 24 Februari 2020	Pemetaan program pada usulan prioritas yang disesuaikan berdasarkan Permendagri No. 90 (Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang)
17	Selasa, 25 Februari 2020	Pemetaan program pada usulan prioritas yang disesuaikan berdasarkan Permendagri No. 90 (Kecamatan Jasinga, Parung, Ciampea)
18	Rabu, 26 Februari 2020	Pemetaan program pada usulan prioritas yang disesuaikan berdasarkan Permendagri No. 90 (Kecamatan Nanggung, Tenjolaya, Rumpin, Leuwisadeng, Taman Sari)

19	Kamis, 27 Februari 2020	Survei lokasi usulan musrenbang kecamatan pada sub bidang ketahanan pangan dan pertanian
20	Jum'at, 28 Februari 2020	Pemetaan program pada usulan prioritas yang disesuaikan berdasarkan Permendagri No. 90 (Kecamatan Cigudeg, Tenjo, Leuwiliang, Ciseeng, Sukajaya)

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin PKL Kelompok Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Kampus Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi It. 1, Jakarta 13220
Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id

Building Future Leaders


Nomor : 17164/UN39.12/KM/2019 31 Desember 2019
Lamp. : 1 lembar
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Kepada Yth.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.41, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

Sehubungan dengan adanya tugas salah satu mata kuliah, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenjang : S1
Sebanyak : 2 mahasiswa (Ilma Nur Fauziah, dkk) Daftar nama terlampir
Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah "**Praktik Kerja Lapangan**" pada tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
No. Telp/Hp : 089662563273

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


 Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Woro Sasmoyo, SH.
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi

 Scanned with CamScanner

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Izin PKL Kelompok di Bappedalitbang Kabupaten Bogor

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong-Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 20 Januari 2020

Nomor : 424 / 110 -Kesbangpol
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Bogor
di -
Tempat

Dasar :

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Surat dari : **Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat – Universitas Negeri Jakarta** Nomor : 17164/UN39.12/KM/2019 Tanggal: 31 Desember 2019 Perihal : **Pemohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok**
Atas dasar tersebut di atas, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** dilaksanakannya kegiatan PKL yang dilakukan oleh:

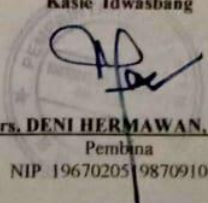
Nama : Ilma Nur Fauziah
Alamat : Perum Bogor Asri Blok B3 No.15 Rt/Rw 013/009 Kel. Nanggewer
Kec. Cibinong
Penanggung Jawab : Woro Sasmoyo, SH
Jumlah Peserta : 2 (Dua) orang
Waktu : 03 Februari – 28 Februari 2020
Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bogor

dengan ketentuan :


1. Mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor.
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar **Mahasiswa/i** yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor
Kasie Idwasbang


Drs. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina
NIP. 196702051987091001

Tembusan - Kepada
Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan).
2. Ka.Bag Humas - UNJ

 Scanned with CamScanner

Lampiran 4. Lembar Absensi PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227 4706285, Fax (021) 4706285
Laman www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..... SKS

Nama : SARAH SABILLA
No Registrasi : 1701617167
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Tempat Praktik : BAPEDA LITBANG KAB. BOGOR
Alamat Praktik/Telp : Jl. Sejar III Kav. 2 Penda
(021) 87906240

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 03-02-2020	1. Paraf	
2.	Selasa, 04-02-2020	2. Paraf	
3.	Rabu, 05-02-2020	3. Paraf	
4.	Kamis, 06-02-2020	4. Paraf	
5.	Jum'at, 07-02-2020	5. Paraf	
6.	Senin, 10-02-2020	6. Paraf	
7.	Selasa, 11-02-2020	7. Paraf	
8.	Rabu, 12-02-2020	8. Paraf	
9.	Kamis, 13-02-2020	9. Paraf	
10.	Jum'at, 14-02-2020	10. Paraf	
11.	Senin, 17-02-2020	11. Paraf	
12.	Selasa, 18-02-2020	12. Paraf	
13.	Rabu, 19-02-2020	13. Paraf	
14.	Kamis, 20-02-2020	14. Paraf	
15.	Jum'at, 21-02-2020	15. Paraf	



Jakarta, Cibinug, 28-02-2020
Penilai,

[Signature]
Rahmi Kasmelia

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..... SKS

Nama : Sarah Sabilla
No. Registrasi : 1701617167
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Tempat Praktik : Bappedalitbang Kab. Bogor
Alamat Praktik/Telp : Jl. Segar III Kav. Pemda

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 24 - 02 - 2020	<i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 25 - 02 - 2020	<i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 26 - 02 - 2020	<i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 27 - 02 - 2020	<i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 28 - 02 - 2020	<i>[Signature]</i>	
6.		6.....	
7.		7.....	
8.		8.....	
9.		9.....	
10.		10.....	
11.		11.....	
12.		12.....	
13.		13.....	
14.		14.....	
15.		15.....	



Jakarta, Cibond, 28-02-2020
Penilai,

[Signature]
(Rahmi K)

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legittas dengan membubuhi cap Instansi Perusahaan BOGOR

Lampiran 5. Lembar Penilaian PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI



Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285
Email: www.fe.unj.ac.id

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
..... SKS

Nama: Sarah Sabilla
No Registrasi: 1701619167
Program Studi: Pendidikan Ekonomi
Tempat Praktik: Bappedalitbang Kab. Bogor
Alamat Praktik/Telp: Jl. Segar III Kav. 2. Penda

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	KETERANGAN																														
		46-100																															
1	Kehadiran	100%	1 Keterangan Penilaian <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1
Skor	Nilai	Bobot																															
86-100	A	4																															
81-85	A-	3,7																															
76-80	B+	3,3																															
71-75	B	3,0																															
66-70	B-	2,7																															
61-65	C+	2,3																															
56-60	C	2,0																															
51-55	C-	1,7																															
46-50	D	1																															
2	Kedisiplinan	95																															
3	Sikap dan Kepribadian	90																															
4	Kemampuan Dasar	95																															
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	95																															
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	90																															
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	95																															
8	Aktivitas dan Kreativitas	92																															
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	92																															
10	Hasil Pekerjaan	95																															
Jumlah			2 Alokasi Waktu Praktik 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif Nilai Rata-rata $\frac{939}{10 \text{ (sepuluh)}} = 93,9$ Nilai Akhir <table border="1"> <tr> <td>94</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	94	A	Angka bulat	huruf																										
94	A																																
Angka bulat	huruf																																



Jakarta: Cibinong 28-02-2018
Penilai:

Rahmi Karwella

Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi Perseorangan

Lampiran 6. Surat Keterangan PKL di Bappedalitbang Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. SEGAR III KAV.2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR
Telp. (021) 87906240, Fax. 87906242 - Cibinong 16914
E-mail : bappeda@bogorkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 867/ 297 - Sekret

- Dasar : 1. Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, nomor 17164/UN39.12/KM/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok
2. Surat Kasie Idwasbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, nomor 424.4/110-Kesbangpol tanggal 20 Januari 2020 perihal Rekomendasi Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Atas ketentuan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **SARAH SABILLA**
Alamat : Perum Villa Mutiara Bogor 2 D2 Nomor 25, RT. 009/012, Desa Waringinjaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor
NIM : 1701617167
Departemen/Program Studi : Fakultas Ekonomi/Pendidikan Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

Adalah benar yang bersangkutan diterima serta sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Kelompok di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 s.d 28 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 11 Februari 2020

a. n. KEPALA
SEKRETARIS,

Ir. DADANG SOFYAN ISKANDAR, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640814 199303 1 006

Lampiran 8. Panduan Murenbang Geopark Nasional Pongkor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. SEGAR III KAV. 2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR
Telp. (021) 87906240 Fax. 87906242 - Cibinong 16914
E-mail: bappedada.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Februari 2020

Nomor : 556 / 311 - PSDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pedoman Usulan Kegiatan
Musrenbang Geopark Nasional
Pongkor 2020

Kepada
Yth. Camat
Kabupaten Bogor
Di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan Geopark Nasional Pongkor menuju Unesco Global Geopark Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Geopark berdasarkan warisan Geologi dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Musrenbang Geopark Nasional Pongkor ini merupakan media dalam Geopark sebelum tersusunya Masterplan Geopark Nasional Pongkor, perencanaan tersebut sedikitnya memuat (1) program konservasi Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity); (2) program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif; (4) program pelestarian sosial budaya; (5) pengembangan destinasi pariwisata; (6) inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung; (7) penyediaan informasi keberadaan Geopark (visibility Geopark), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Geopark, (8) pengembangan kelembagaan Geopark meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan; (9) program promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan (10) program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark nasional, regional, dan global.

Musrenbang Geopark Nasional Pongkor merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas, yang pada perencanaan tahun 2021 di prioritaskan

Lampiran 9. Format Usulan Musrenbang

FORMAT 2

**DAFTAR USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG GEOPARK
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021**

KECAMATAN

NO	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI			ANGGARAN (Rp)	ALASAN	PERANGKAT DAERAH TUJUAN
				KECAMATAN	DESA	DETAIL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Obinong, Februari 2020
Camat

(_____)

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut kegiatan yang diusulkan

Kolom (2) : Diisi dengan kegiatan yang diusulkan dan telah disepakati oleh forum (sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat)

Kolom (3),(4),(5) : Diisi dengan volume, satuan dan pagu indikatif anggaran yang diusulkan sesuai dengan peraturan yang disepakati

Kolom (6),(7) : Diisi dengan nama desa, Detail : Calon Penerima, alamat lengkap, Bani, RT, RW dan informasi detail lainnya yang memudahkan untuk penelusuran

Kolom (8) : Mempunyai alasan kenapa harus diusulkan

Kolom (9) : Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang diuju sesuai dengan kewenangan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

Kolom (10) : Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang diuju sesuai dengan kewenangan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

Lampiran 10. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Terkait Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Geopark Nasional Pongkor

a. Urusan Bidang Infrastruktur

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR					KETERANGAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase utama perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	2.02	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2.01	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pegelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendungan Irigasi
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan lingkungan
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/kota
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan aSinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Bogot
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencanaatau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi/Relokasi Perumahan

b. Urusan Bidang Perekonomian

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN				
URUSAN	KODE	KETERANGAN		
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90/2019				
2	09	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02	2.01	PROGRAM PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	2.01 01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	02	2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	2.01 04	koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
2	09	02	2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01	penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
2	09	03	2.01 02	penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
2	09	03	2.01 03	koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya
2	09	03	2.02	pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota
2	09	03	2.02 01	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota
2	09	03	2.02 03	pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
2	09	03	2.02 04	Pemeliharaan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten atau kota
2	09	04	2.02 01	koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
2	09	04	2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	07	2.01 01	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	07	2.01 02	Pemberdayaan Melalui kemitraan Usaha Mikro
2	17	07	2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2	17	07	2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	07	2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2	17	08	2.01 01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota
2	22	02	2.01 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan
2	22	02	2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN LAGAR BUDAYA
2	22	05	2.02	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
2	22	05	2.02 02	pengecahan dan penanggulangan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya
2	22	05	2.02 03	peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya
2	22	05	2.02 04	pendayagunaan cagar budaya
2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	06	2.01	Pengelolaan museum kabupaten/kota
22	22	06	2.01 01	perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu
22	22	06	2.01 03	peningkatan akses masyarakat terhadap museum
22	22	06	2.01 04	penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum
22	22	06	2.01 05	revitalisasi sarana dan prasarana museum
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUATAN DAN PERIKANAN
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02 02	pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	03	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan
3	25	03	2.04 06	Perencanaan, pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan ikan di Darat
3	25	03	2.04 07	Perencanaan, pengembangan pemanfaatan Air Untuk pembudidayaan ikan darat
3	25	05	2.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	05	2.02 01	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	05	2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
3	25	05	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3	25	05	2.03 01	Peningkatan Ketersediaan ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3	25	05	2.03 02	Pemberian Fasilitas Bagi Usaha Pengolahan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
3	26	02	2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
3	26	02	2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
3	26	02	2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
3	26	02	2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
3	26	02	2.02	Pengenalan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota

c. Urusan Bidang Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
URUSAN	BIDANG / URUSAN	KODE			KETERANGAN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN					
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1	01	02	2	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
1	01	02	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	2	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1	01	02	2	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1	01	02	2	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	2	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama
1	01	02	2	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1	01	02	2	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1	01	02	2	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	02	2	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
1	01	02	2	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adta Terpencil (KAT)
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	2		Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
1	06	06	2	01	penyediaan makanan
1	06	06	2	02	penyediaan sandang
1	06	06	2	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	2	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1	06	06	2	05	Pelayanan Dukungan Psikologis
1	06	06	2		Penyelenggaraan Pemeberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	06	06	2	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1	06	06	2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna siaga bencana
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Tenaga Kerja Mikro
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan

a. Kegiatan Olahraga Rutin



b. Kegiatan Menanam Bersama



c. Foto Bersama Bidang PSDA

